

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2021

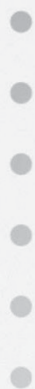


**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2021



Indikator Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Kepulauan Riau 2021

ISBN : 2442-6199
Katalog : 4102004.21
No. Publikasi : 21000.2226

Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xiv + 93 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Dicetak Oleh:

CV. Bintang Printing

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

“Indikator Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kepulauan Riau 2021”

Pengarah

Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab

Dian Kartika Sari, SST, M.Si

Pengolah Data

Putri Wahyu Handayani, SST, M.S.E
Utary Hafiza, SST

Penulis Naskah

Putri Wahyu Handayani, SST, M.S.E
Utary Hafiza, SST

Perwajahan dan Penata Letak

Utary Hafiza, SST

Infografis

Yeni Putriyanti, S.Stat

Kata Pengantar

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau 2021 merupakan publikasi yang disajikan secara beralas setiap tahun. Publikasi ini menyajikan tingkat kesejahteraan rakyat Provinsi Kepulauan Riau antarwaktu serta perbandingannya antarkabupaten/kota atau antardaerah perkotaan dan perdesaan.

Data yang digunakan sebagian besar bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus.

Publikasi ini mencakup beberapa aspek diantaranya kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan, kemiskinan, dan sosial budaya.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi pengguna data. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian publikasi ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Tanjungpinang, Oktober 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kepulauan Riau



Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
1. Kependudukan	1
1.1 Pendahuluan.....	3
1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	4
1.3 Distribusi Penduduk.....	5
1.4 Komposisi Penduduk.....	6
2. Kesehatan dan Gizi.....	9
2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Derajat dan Kesehatan Penduduk.....	12
2.3 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	19
2.4 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	21
3. Pendidikan.....	23
3.1 Pendahuluan.....	25
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.3 Tingkat Pendidikan	28
3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah	29
3.5 Kualitas Layanan Pendidikan.....	31
4. Ketenagakerjaan	35
4.1 Pendahuluan.....	37
4.2 Angkatan Kerja	38

Daftar Isi

4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	39
4.4	Penduduk yang Bekerja	40
4.5	Tingkat Pengangguran	44
5.	Taraf dan Pola Konsumsi	49
5.1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	51
5.2	Konsumsi Kalori dan Protein	54
6.	Perumahan dan Lingkungan	57
6.1	Pendahuluan.....	59
6.2	Kualitas Rumah Tinggal.....	60
6.3	Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah.....	62
7.	Kemiskinan	67
7.1	Perkembangan Penduduk Miskin.....	69
7.2	Garis Kemiskinan.....	70
7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	74
8.	Sosial Lainnya	77
8.1	Pendahuluan.....	79
8.2	Perlindungan Sosial.....	79
8.3	Akses terhadap Informasi.....	79
8.4	Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga.....	81
8.5	Tindak Kejahatan.....	82
	Lampiran	87

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2010, 2020, dan 2021.....	4
Tabel 1.2	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2021	6
Tabel 1.3	Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, 2021.....	7
Tabel 2.1	Perkembangan UHH saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021	14
Tabel 2.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020 dan 2021.....	17
Tabel 2.3	Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	20
Tabel 2.4	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	21
Tabel 5.1	Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau, 2021.....	52
Tabel 5.2	Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, 2020 dan 2021	55
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	61
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Pokok Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021.....	64

Daftar Tabel

Tabel 7.1	Garis Kemiskinan Makan dan Bukan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021	71
Tabel 7.2	Daftar Komoditi Berdasarkan Sumbangan terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021	72
Tabel 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021	75
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/ Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	80
Tabel 8.2	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	82
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	83
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Pernah Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	84
Tabel 8.5	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2021..	86

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2021	8
Gambar 2.1	Perkembangan UHH saat Lahir Indonesia dan Provinsi Kepulauan Riau (Tahun), 2017-2021	13
Gambar 2.2	Perkembangan UHH saat Lahir per Tahun menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2017-2021	39
Gambar 2.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021	16
Gambar 2.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan (Angka Kesakitan) selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021	18
Gambar 2.5	Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	19
Gambar 3.1	HLS dan RLS Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2021	28
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021	29
Gambar 3.3	APS Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2019-2021	30
Gambar 3.4	APM Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2019-2021	31
Gambar 3.5	Rasio Murid Guru di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2020/2021	33
Gambar 4.1	Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2021	39

Daftar Gambar

Gambar 4.2	TPAK di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2019-Agustus 2021	40
Gambar 4.3	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2020 dan Agustus 2021.....	42
Gambar 4.4	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Riau (Orang), Agustus 2020 dan Agustus 2021.....	43
Gambar 4.5	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu di Provinsi Kepulauan Riau (Orang), Agustus 2020 dan Agustus 2021.....	44
Gambar 4.6	Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (Orang), Agustus 2020 dan Agustus 2021.....	45
Gambar 4.7	TPT Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2020 dan Agustus 2021.....	47
Gambar 5.1	Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kuartil (Persen), 2021	53
Gambar 5.2	Perkembangan <i>Gini Ratio</i> Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016-Maret 2021.....	54
Gambar 7.1	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016-Maret 2021	70
Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Jenis Kredit di Provinsi Kepulauan Riau, 2021.....	85

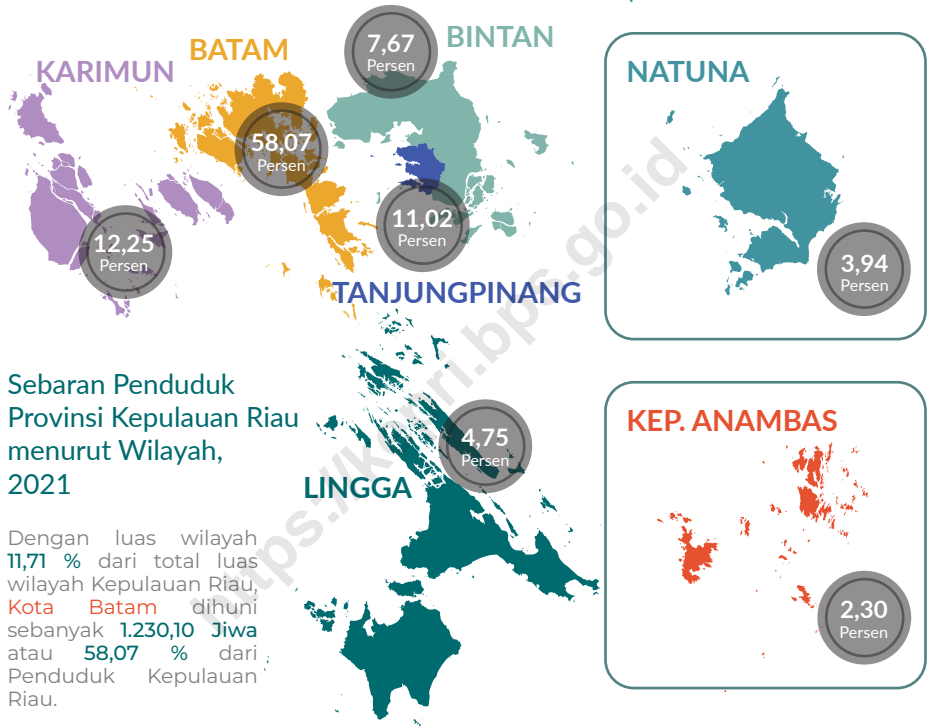
Daftar Lampiran

Lampiran 1. *Sampling Error* Indikator..... 89

<https://kepri.bps.go.id>

KEPENDUDUKAN

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Informasi kependudukan bersumber dari hasil Sensus Penduduk yang dilakukan tiap 10 tahun sekali.



1.037.522 Jiwa



1.080.717 Jiwa

PENDUDUK PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT JENIS KELAMIN, 2021

Rasio Jenis Kelamin Provinsi Kepri sebesar 104,16

Bab 1

Kependudukan

1.1 Pendahuluan

Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas seperti mengurangi jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, dan menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk.

Kondisi kependudukan saat ini akan mempengaruhi dinamika pembangunan ke depan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan pembangunan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

1.2 Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama setahun terakhir (2020-2021), laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Kepulauan Riau sebesar 1,94 persen. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau cukup bervariasi. Adapun LPP tertinggi yaitu Kota Batam sebesar 2,11 persen, sedangkan LPP terendah yaitu Kabupaten Bintan sebesar 1,43 persen. Pertumbuhan penduduk Kota Batam yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh migrasi masuk penduduk dari luar Provinsi Kepulauan Riau yang bertujuan untuk bekerja, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi lainnya.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2010, 2020, dan 2021

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu jiwa)			LPP	
	2010	2020	2021	2010-2021	2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	212,56	253,50	259,45	1,72	1,77
Bintan	142,30	159,50	162,56	1,11	1,43
Natuna	69,00	81,50	83,36	1,62	1,72
Lingga	86,24	98,60	100,66	1,31	1,54
Kep. Anambas	37,41	47,40	48,74	2,32	2,10
Batam	944,29	1 196,4	1 230,10	2,32	2,11
Tanjungpinang	187,36	227,70	233,37	1,90	1,87
Kepri	1 679,16	2 064,60	2 118,24	2,02	1,94

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020

1.3 Distribusi Penduduk

Distribusi Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau sangat tidak merata antar kabupaten/kota. Lebih dari separuh penduduk Provinsi Kepulauan Riau berada di Kota Batam, yaitu sebesar 58,07 persen pada tahun 2021. Sementara itu, penduduk di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Kepulauan Anambas masing-masing hanya sebesar 4,75 persen, 3,94 persen, dan 2,30 persen.

Bila dilihat dari tingkat kepadatan penduduk, kedua kota di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kota Tanjungpinang dan Kota Batam memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan ternyata kepadatan penduduk Kota Tanjungpinang lebih tinggi dibandingkan Kota Batam, yaitu mencapai 1.614,33 jiwa per km². Sementara itu, Kabupaten Lingga dan Natuna yang merupakan dua kabupaten terluas di Provinsi Kepulauan Riau memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 44,41 jiwa per km² dan 41,49 jiwa per km².

Tabel 1.2 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2021

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (km ²)	Penduduk (jiwa)	Distribusi Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	912,75	259 452	12,25	284,25
Bintan	1 318,21	162 561	7,67	123,32
Natuna	2 009,04	83 364	3,94	41,49
Lingga	2 266,77	100 661	4,75	44,41
Kep. Anambas	590,14	48 737	2,30	82,59
Batam	960,25	1 230 097	58,07	1 281,02
Tanjungpinang	144,56	233 367	11,02	1 614,33
Jumlah	8 201,72	2 118 239	100,00	258,27

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020

1.4 Komposisi Penduduk

Beberapa permasalahan kependudukan seperti jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin perlu selalu diperhatikan perkembangannya. Informasi yang dipilah berdasarkan jenis kelamin dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan berapa besar jumlah penduduk perempuan dan laki-laki. Di sisi lain, informasi mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat memberikan gambaran berapa jumlah penduduk yang termasuk dalam penduduk golongan tua dan golongan muda. Informasi-informasi tersebut sangat diperlukan untuk mempermudah para *stakeholder* dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada.

Tabel 1.3 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Kelamin, 2021

Kabupaten/ Kota	Laki-laki (L)	Perempuan (P)	L + P	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	132 836	126 616	259 452	104,91
Bintan	83 761	78 800	162 561	106,30
Natuna	42 853	40 511	83 364	105,78
Lingga	51 918	48 743	100 661	106,51
Kep. Anambas	25 194	23 543	48 737	107,01
Batam	626 593	603 504	1 230 097	103,83
Tanjungpinang	117 562	115 805	233 367	101,52
Jumlah	1 080 717	1 037 522	2 118 239	104,16

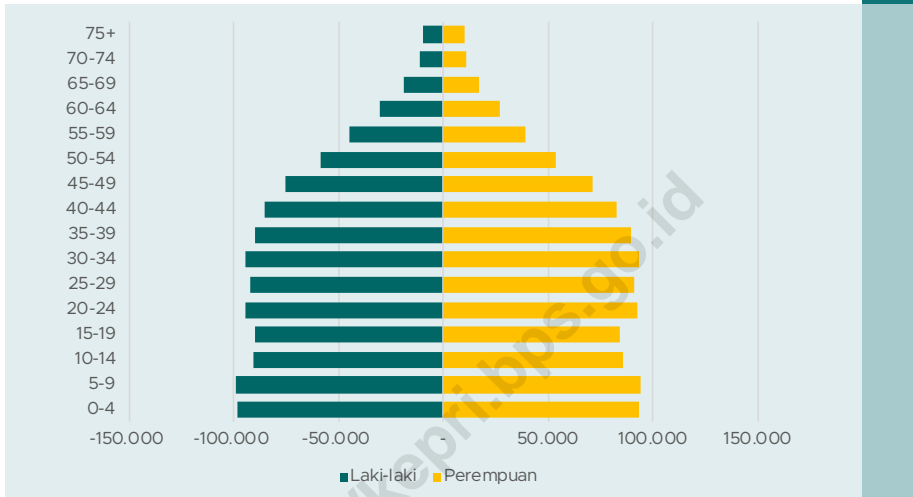
Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020

a Sex Ratio

Sex ratio penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebesar 104,16. Artinya untuk setiap 100 penduduk perempuan ada 104 penduduk laki-laki. Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa sex ratio di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau lebih dari 100 atau dapat diartikan bahwa di setiap kabupaten/kota lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan penduduk perempuan.

b Piramida Penduduk

Gambar 1.1 Piramida Penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2021



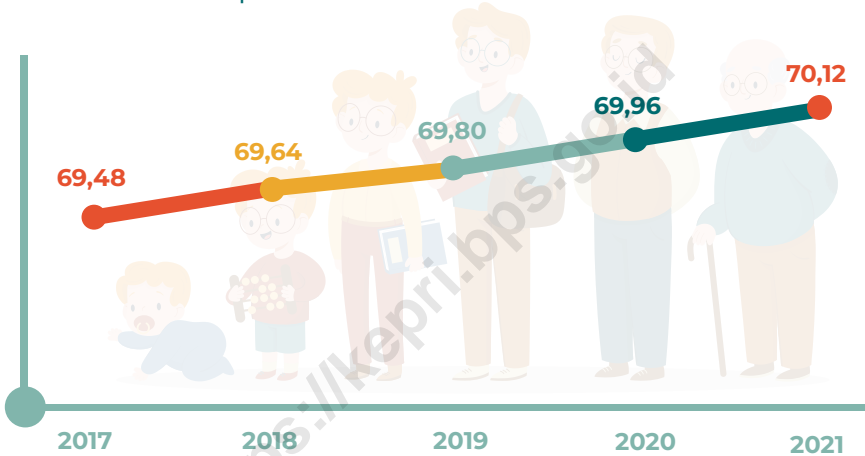
Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020

Penduduk Provinsi Kepulauan Riau masih tergolong “penduduk muda”. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk usia 0-9 tahun dan usia 20-39 tahun yang masing-masing sebesar 18,16 persen dan 34,86 persen.

KESEHATAN DAN GIZI

Informasi kesehatan dan gizi bersumber dari hasil Susenas. Data karakteristik rumah tangga diperoleh dari Susenas Kor, sedangkan data pengeluaran kesehatan berasal dari Susenas Konsumsi/Pengeluaran.

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir di Provinsi Kepulauan Riau.

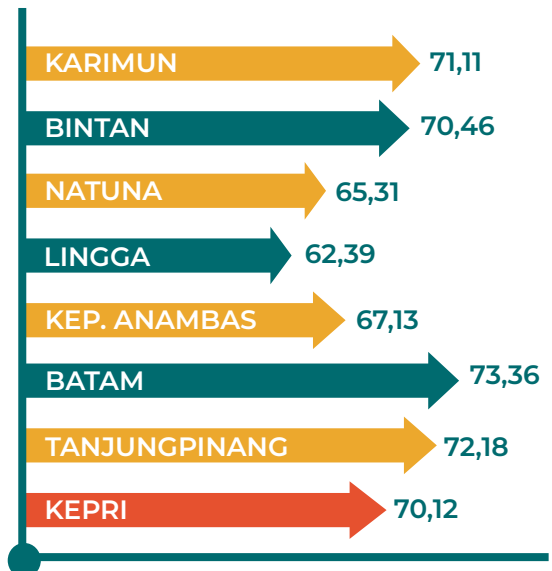


Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seorang sejak lahir

Anak yang lahir di Provinsi Kepulauan Riau dapat hidup rata-rata sampai usia **70,12** tahun.



Umur Harapan Hidup (UHH) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Bab 2

Kesehatan dan Gizi

2.1 Pendahuluan

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu, aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan, dan jenis pengobatan yang dilakukan.

Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup dan mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Target grup pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat tertinggal. Untuk itu, peran serta masyarakat terus ditingkatkan melalui pengelolaan kesehatan terpadu, termasuk dunia usaha. Secara kuantitas dan kualitas, penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga terus ditingkatkan.

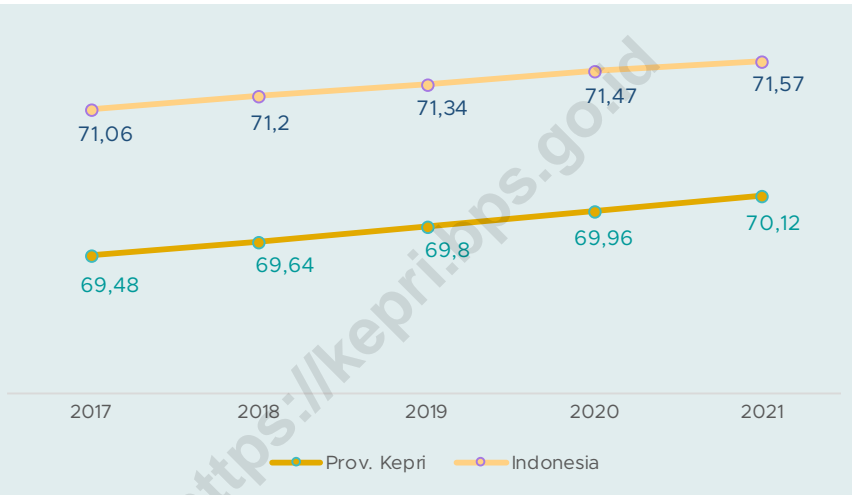
Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi hambatan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan dengan Program Askeskin yang berlaku sejak 1 Januari 2005. Program ini bertujuan agar akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan.

2.2 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Indonesia tahun 2020 sebesar 71,47 tahun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 71,57 tahun. Pada tahun 2021, UHH saat lahir Provinsi Kepulauan Riau masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional dimana diperkirakan anak yang lahir pada tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau dapat hidup rata-rata sampai usia

70,12 tahun dengan catatan bila diasumsikan bahwa kondisi kesehatan dan kematian yang ada akan berjalan seperti pada saat ini (tidak berubah). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Perkembangan UHH saat Lahir Indonesi dan Provinsi Kepulauan Riau (Tahun), 2017-2021



Sumber: BPS, Sensus dan Survei Kependudukan diolah

Jika dilihat UHH saat lahir menurut kabupaten/kota pada Tabel 2.1, UHH saat lahir selama periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Laju peningkatan UHH saat lahir masing-masing kabupaten/kota cukup bervariasi yaitu antara 0,23 persen sampai dengan 2,04 persen (dapat dilihat pada Gambar 2.2). Laju peningkatan UHH saat lahir tidak terlepas dari usaha pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka menjamin kesehatan bersama.

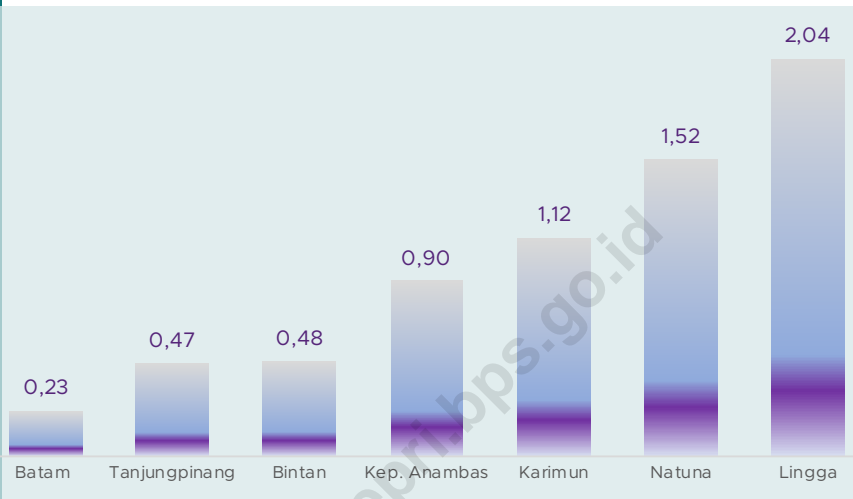
Tabel 2.1 Perkembangan UHH saat Lahir Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota, 2017-2021

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	70,32	70,52	70,71	70,91	71,11
Bintan	70,12	70,21	70,30	70,38	70,46
Natuna	64,33	64,57	64,81	65,06	65,31
Lingga	61,14	61,44	61,75	62,06	62,39
Kep. Anambas	66,76	66,91	67,06	67,21	67,36
Batam	73,19	73,24	73,29	73,33	73,36
Tanjungpinang	71,84	71,93	72,02	72,10	72,18
Kepulauan Riau	69,48	69,64	69,80	69,96	70,12
Indonesia	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57

Sumber: BPS, Sensus dan Survei Kependudukan diolah

Berdasarkan Tabel 2.1 dan Gambar 2.2, terlihat bahwa Kabupaten Lingga dengan UHH saat lahir terendah ternyata memiliki perkembangan UHH saat lahir yang lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sebaliknya, Kota Batam dengan UHH saat lahir tertinggi justru memiliki perkembangan yang lebih lambat.

Gambar 2.2 Perkembangan UHH saat Lahir per Tahun menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2017–2021

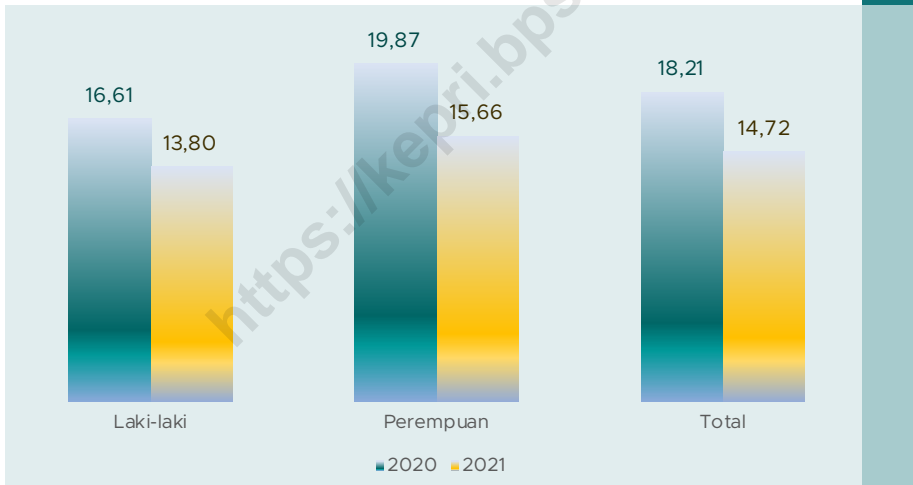


Sumber: BPS, Sensus dan Survei Kependudukan diolah

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang selama sebulan sebelum pencacahan Susenas 2021 mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sebelum melihat angka kesakitan, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Gambar 2.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 sebanyak 14,72 persen penduduk mempunyai keluhan kesehatan. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 18,21 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mempunyai keluhan kesehatan, dimana untuk penduduk laki-laki sebesar 13,80 persen dan penduduk perempuan sebesar 15,66 persen (kondisi tahun 2021). Jika dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi penurunan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan baik laki-laki maupun perempuan.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan 2021

Jika ditinjau menurut kabupaten/kota, terlihat pada Tabel 2.2 bahwa tingkat keluhan kesehatan antarkabupaten/kota bervariasi. Pada tahun 2021, kabupaten/kota dengan banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan tertinggi yaitu Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga yaitu 19,54 persen dan 18,62 persen. Adapun yang terendah adalah Kabupaten Natuna sebesar 9,57 persen.

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021

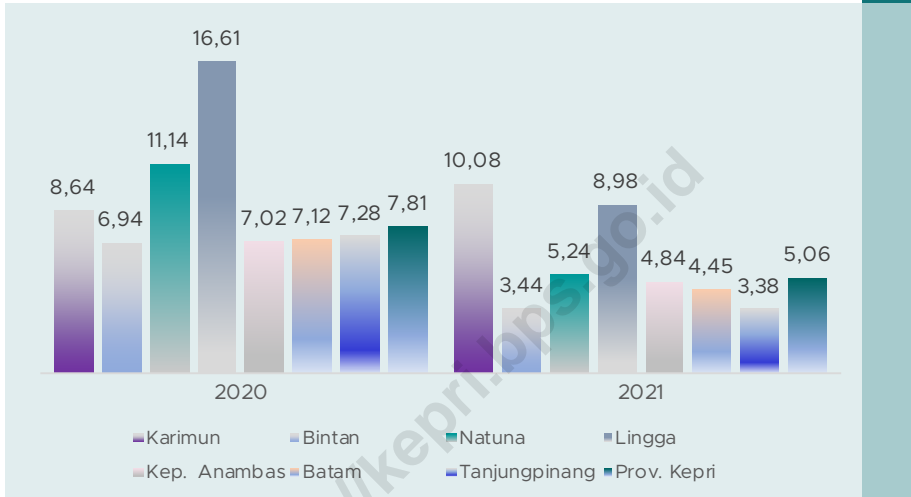
Kabupaten/ Kota	2020			2021		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Karimun	20,66	25,87	23,21	18,47	20,66	19,54
Bintan	13,26	17,26	15,21	11,27	10,63	10,97
Natuna	21,53	23,28	22,38	8,48	10,74	9,57
Lingga	27,74	26,59	27,18	17,17	20,13	18,62
Kep. Anambas	18,35	20,05	19,17	9,51	11,19	10,32
Batam	14,66	17,40	16,00	14,06	16,18	15,12
Tanjungpinang	20,75	27,42	24,06	10,28	11,05	10,66
Kep. Riau	16,61	19,87	18,21	13,80	15,66	14,72
Indonesia	29,29	32,65	30,96	26,15	28,32	27,23

Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan 2021

Secara umum, pada tahun 2021 persentase penduduk perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki di semua kabupaten/kota kecuali Kabupaten Bintan. Sementara itu, pada tahun 2020 persentase penduduk laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yaitu Kabupaten Lingga.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota dan jenis kelamin, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 di setiap kabupaten/kota, baik penduduk laki-laki maupun penduduk perempuan.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan (Angka Kesakitan) selama Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan 2021

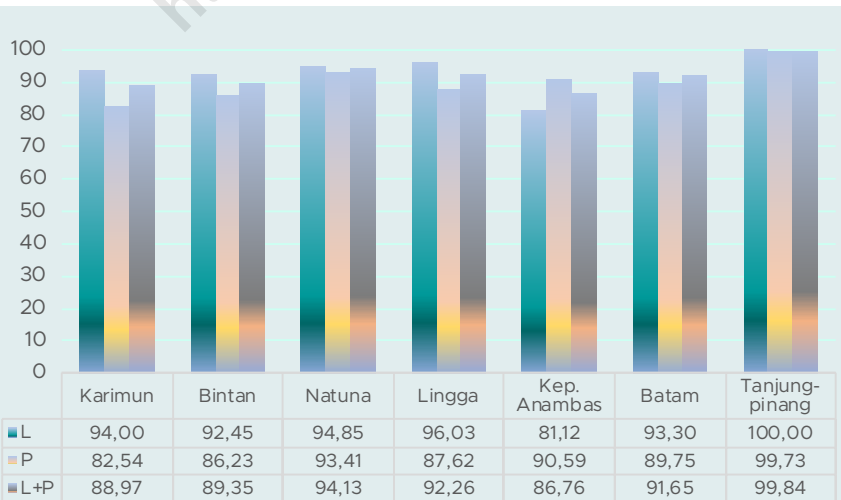
Indikator kesehatan berikutnya yang membutuhkan perhatian khusus yaitu angka kesakitan. Berdasarkan Gambar 2.4 hanya Kabupaten Karimun yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan. Adapun kabupaten/kota lain mengalami penurunan persentase dari tahun 2020 ke tahun 2021. Secara keseluruhan, pada tahun 2021 terdapat 5,06 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang mengalami keluhan kesehatan hingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Kabupaten Karimun menjadi kabupaten dengan persentase angka kesakitan tertinggi tahun 2021, yaitu sebesar 10,08 persen.

2.3 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Salah satu faktor penting pertumbuhan dan perkembangan balita adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), karena ASI merupakan zat makanan yang paling ideal terutama untuk pertumbuhan bayi, selain itu juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 menunjukkan bahwa sekitar 91,92 persen bayi usia di bawah 2 tahun (baduta) di Provinsi Kepulauan Riau pernah diberi ASI. Kabupaten/kota yang memiliki persentase baduta yang pernah diberi ASI lebih tinggi dibandingkan dengan angka provinsi yaitu Tanjungpinang, Natuna, dan Lingga.

Gambar 2.5 Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2020 dan 2021

Untuk mencegah berbagai penyakit menular, pemerintah memberikan beberapa antigen untuk balita dan anak-anak. Adapun antigen yang dianggap penting adalah BCG, Polio, DPT, dan Campak untuk mencegah penyakit yang biasanya menyerang anak-anak yang diduga dapat menyebabkan kematian pada bayi. Berdasarkan Tabel 2.3 diketahui bahwa balita di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah diberikan imunisasi campak masih di bawah 80 persen.

Tabel 2.3 Persentase Balita yang Pernah Diimunisasi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	BCG	Polio	DPT	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karimun	94,33	93,76	91,02	73,82	89,82
Bintan	93,30	93,00	91,92	77,98	87,83
Natuna	76,17	77,83	68,18	57,43	72,18
Lingga	81,85	82,88	72,31	66,36	79,47
Kep. Anambas	95,83	95,27	89,72	78,91	86,29
Batam	90,19	91,96	88,41	71,98	92,10
Tanjungpinang	98,84	92,85	90,04	68,70	90,19
Kep. Riau	90,75	91,61	87,93	71,78	90,51

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

2.4 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal dimana mereka berada. Berdasarkan Tabel 2.4, diketahui bahwa penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 lebih banyak yang berobat jalan ke klinik/praktek dokter bersama, yaitu sebesar 25,44 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2021 penduduk Kota Batam yang mayoritas tinggal di daerah perkotaan juga lebih banyak berobat jalan ke klinik/praktek dokter bersama, yaitu sebesar 29,24 persen.

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	14,61	15,44	24,05	23,56
Bintan	34,52	7,78	16,14	23,59
Natuna	23,76	1,20	34,89	13,18
Lingga	5,73	0,00	32,61	4,64
Kep. Anambas	20,33	1,55	7,91	36,80
Batam	6,72	20,96	25,32	29,24
Tanjungpinang	35,79	2,49	12,47	17,63
Kep. Riau	12,44	15,81	23,80	25,44

Tabel 2.4 (lanjutan)

Kabupaten/Kota	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktek Batra/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	23,71	2,57	0,00	1,03
Bintan	18,53	3,50	3,54	2,99
Natuna	34,31	5,33	2,97	0,00
Lingga	38,54	10,64	1,71	9,81
Kep. Anambas	39,19	3,67	0,00	0,92
Batam	13,74	0,07	4,01	2,00
Tanjungpinang	29,89	0,00	2,73	1,95
Kep. Riau	19,26	1,41	3,06	2,32

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

PENDIDIKAN

Informasi pendidikan bersumber dari data hasil Susenas. Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan dengan cakupan relatif luas.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan banyaknya penduduk yang mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan.



Usia penduduk 7-12 tahun **99,62 %**

Usia penduduk 13-15 tahun **98,85 %**

Usia penduduk 16-18 tahun **84,50 %**

APS usia penduduk 7-18 tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Angka Partisipasi Murni (APM) adalah Banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya.



SD

99,26 %



SMP

86,60 %



SMA

73,36 %

APM menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Bab 3

Pendidikan

3.1 Pendahuluan

Pembangunan pendidikan sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, pendidikan, efisiensi manajemen, pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan usia lanjut.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa dibarengi dengan perbaikan sistem pendidikan. Gerakan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7-15 tahun merupakan salah satu bentuk dari usaha yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya program wajib belajar diharapkan mampu meningkatkan partisipasi sekolah bagi anak usia pendidikan dasar, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sama halnya di bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan pun terdapat kesenjangan, walau tidak terlalu jelas seperti bidang kesehatan. Hasil pendidikan sampai sejauh jenjang tertentu

akan tergantung pada pengaruh keluarga, khususnya tingkat pendidikan orang tua dan pada ada tidaknya tekanan bagi anak untuk lekas meninggalkan bangku sekolah agar dapat bekerja.

Di samping itu, pencaangan program wajib belajar tersebut juga diikuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana fisik yang menunjang kegiatan belajar mengajar seperti didirikannya sekolah-sekolah baru baik di daerah perdesaan maupun perkotaan, atau berupa program beasiswa bagi siswa yang berprestasi dan kurang mampu. Telah beberapa tahun pemerintah mengadakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program ini merupakan salah satu bentuk nyata dari usaha pemerintah dalam upaya mengurangi angka putus sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam hal pemenuhan kebutuhan akan pendidikan.

Sebagai tindak lanjut dari keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di bidang pendidikan, maka alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau ke sektor pendidikan nilainya mencapai 20 persen sejak tahun 2007.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

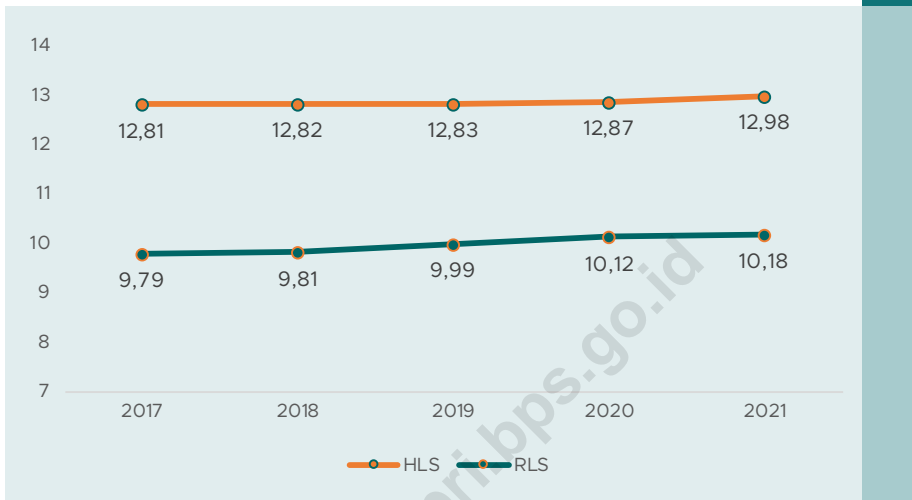
Tingkat kecerdasan dan wawasan seseorang ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Pendidikan merupakan modal dasar

bagi perkembangan suatu peradaban. Dengan pendidikan yang tinggi, maka peluang seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka lebar. Dimensi pendidikan dapat digambarkan melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling (EYS)* dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)*. Kedua indikator tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2021, harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau meningkat 0,11 tahun atau tumbuh sebesar 0,85 persen. Selama periode 2017 hingga 2021, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Harapan lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 12,98 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah hingga 12,98 tahun atau setara dengan menduduki bangku kuliah Diploma I.

Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 meningkat 0,06 tahun atau tumbuh sebesar 0,59 persen. Selama periode 2017-2021, RLS secara rata-rata tumbuh sebesar 0,78 persen per tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia yang lebih baik. Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 mencapai 10,18 yang berarti secara rata-rata penduduk Provinsi Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA kelas I).

Gambar 3.1 HLS dan RLS Provinsi Kepulauan Riau, 2017-2021

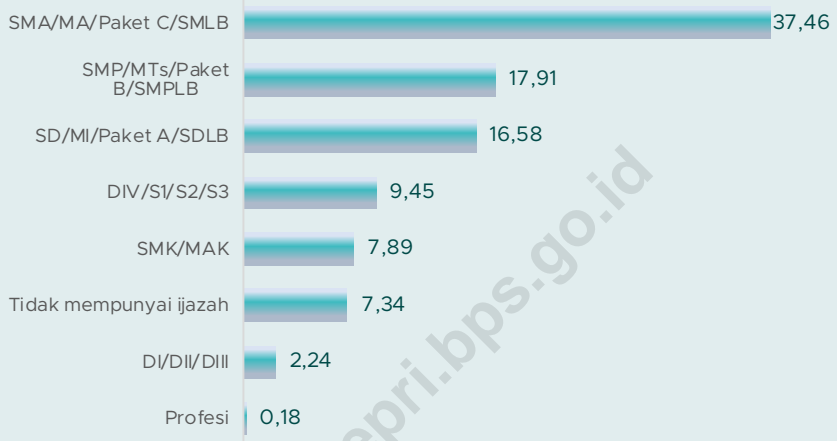


Sumber: BPS, Susenas Maret 2017-2021

3.3 Tingkat Pendidikan

Komitmen 20 persen anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk pendidikan, tercermin dari kondisi pendidikan di tahun 2020. Gambaran mengenai mutu sumber daya manusia dapat dilihat dari ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Terlihat pada Gambar 3.2, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki adalah tamat SMA sebesar 38,48 persen. Sementara itu, masih ada penduduk yang tidak mempunyai ijazah sama sekali yaitu sebesar 9,00 persen di Kepulauan Riau pada tahun 2020.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



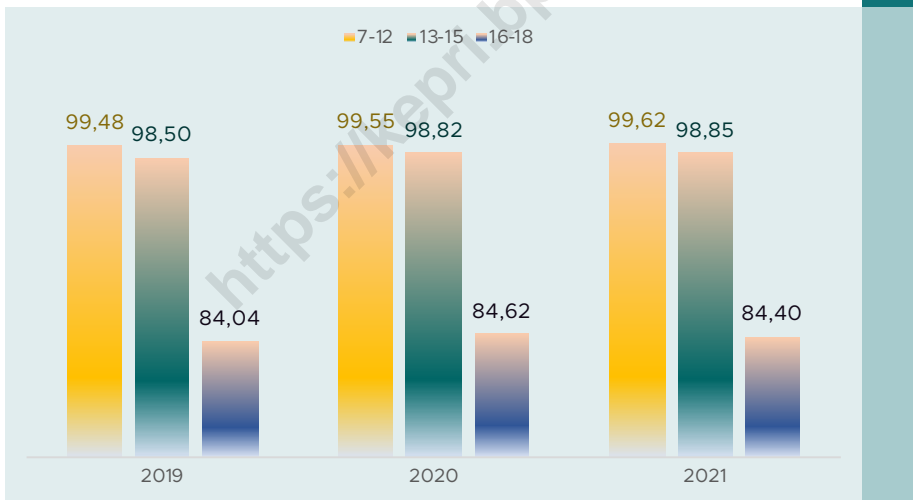
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah indikator yang menggambarkan berapa banyak penduduk yang mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan biasanya disebabkan oleh sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pada Gambar 3.3 terlihat gambaran mengenai APS penduduk usia 7-18 tahun menurut kelompok usia sekolah di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa APS di Provinsi Kepulauan Riau selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan pada kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada usia sekolah dasar (7-12 tahun) APS tahun 2021 sebesar 99,62 persen,

meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 99,55 persen. APS penduduk usia SLTP (13-15 tahun) lebih rendah dibandingkan APS penduduk usia SD, yaitu sebesar 98,85 persen, APS ini juga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 98,82 persen. Sementara itu, APS untuk penduduk usia SLTA (16-18 tahun) tahun 2021 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 84,62 persen menjadi 84,40 persen.

Gambar 3.3 APS Penduduk Usia 7-18 Tahun menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2019-2021

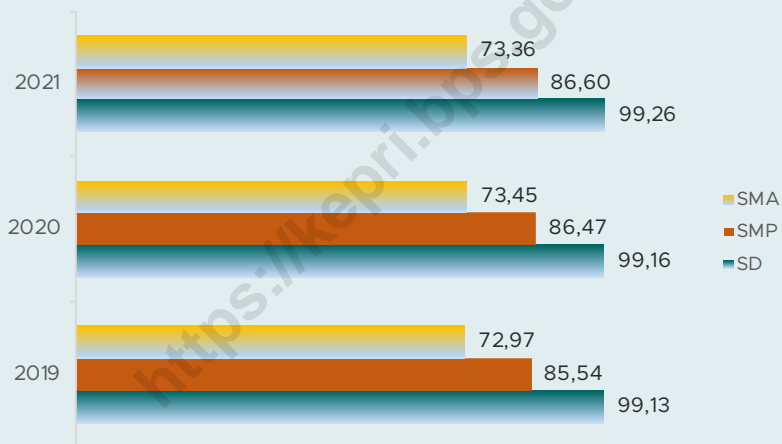


Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2021

Selain indikator APS, juga digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya yang bervariasi antara golongan umur.

Berdasarkan Gambar 3.4, terlihat bahwa APM kelompok usia sekolah SD dan SMP di Provinsi Kepulauan Riau selalu meningkat selama tiga tahun terakhir, sedangkan APM kelompok usia sekolah SMA mengalami penurunan pada tahun 2021 yaitu dari 73,45 menjadi 73,36.

Gambar 3.4 APM Penduduk menurut Kelompok Usia Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2021

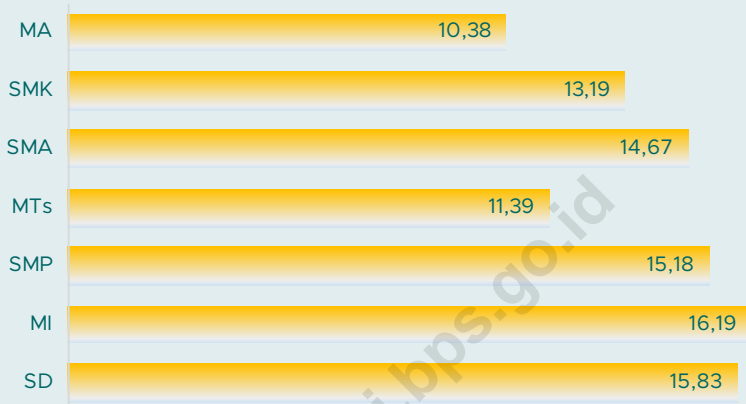
3.5 Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator pendidikan yang lain yang tak kalah pentingnya adalah kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapat diketahui salah satunya dengan tersedianya tenaga pendidik yang memadai dan berkualitas. Indikator yang dapat melihat gambaran tersebut adalah rasio murid terhadap guru.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Syarat Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada pasal 3 antara lain menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dasar adalah jumlah siswa SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) per kelas antara 30-40 siswa. Begitu juga dengan standar pelayanan minimal pada pendidikan menengah pada pasal 4 menyebutkan bahwa jumlah siswa SMA/Madrasah Aliyah (MA) per kelas antara 30-40 siswa.

Sementara itu, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 ayat 1 disebutkan bahwa guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar dengan rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya sebagai berikut: SD sebesar 20:1; MI sebesar 15:1; SMP sebesar 20:1; MTs sebesar 15:1; SMA sebesar 20:1; MA sebesar 15:1; dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 15:1. Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini akan efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan yang berarti bahwa tahun 2016 telah mutlak diberlakukan.

Gambar 3.5 Rasio Murid Guru di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), 2020/2021



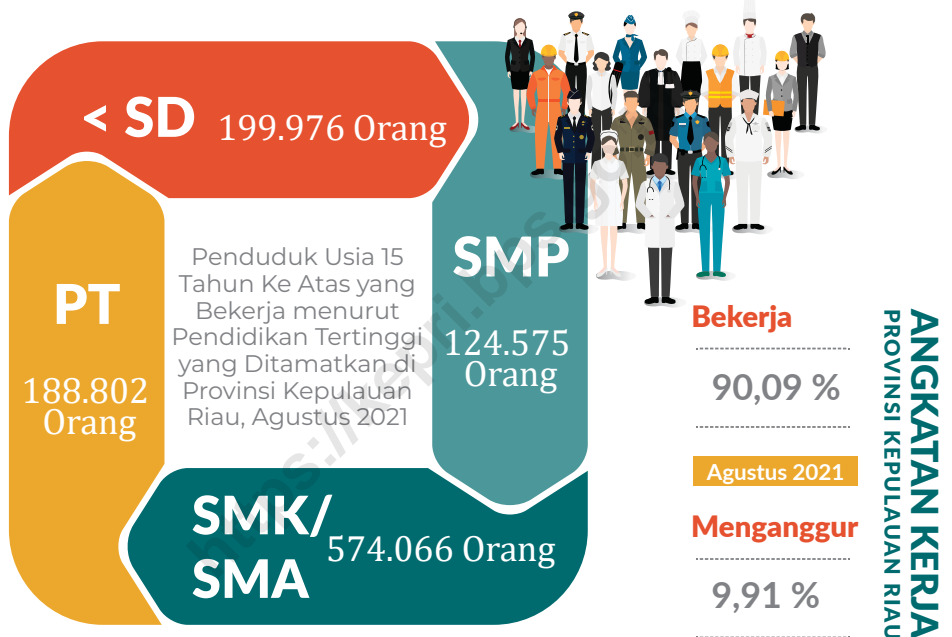
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada Gambar 3.5, diketahui bahwa pada tahun 2020/2021 rasio murid terhadap guru pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004. Begitu juga halnya dengan PP Nomor 74 Tahun 2008, belum memenuhi standar rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya, kecuali pada tingkat MI dimana perbandingannya sudah melebihi standar minimal yaitu 16:1. Kondisi yang belum memenuhi standar tersebut antara lain disebabkan oleh masih banyak sekolah-sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di pulau-pulau kecil dimana jumlah penduduknya relatif sedikit.

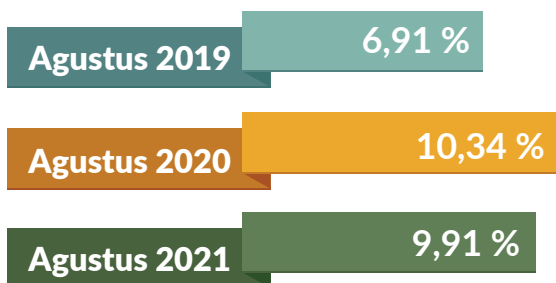
KETENAGAKERJAAN

Informasi ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dan dilaksanakan secara semesteran (Februari dan Agustus).

Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja



Bab 4

Ketenagakerjaan

4.1 Pendahuluan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada

masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi output produksi.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun ke atas. Manakala seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai pengangguran, maka seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran di sini ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

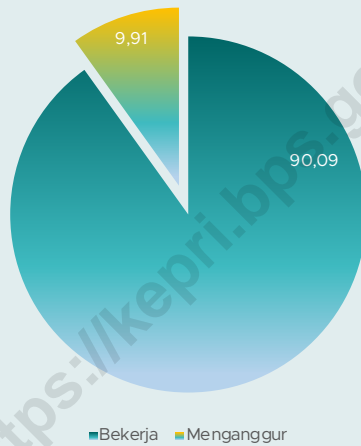
Informasi ketenagakerjaan disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang merupakan survei dengan pendekatan rumah tangga dan dilaksanakan secara semesteran (Februari dan Agustus).

4.2 Angkatan Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Agustus 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021

bertambah sebanyak 73.238 orang dibandingkan keadaan 9,91 persen, sedangkan yang bekerja sebesar 90,09 persen atau dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Angkatan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2021



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2021

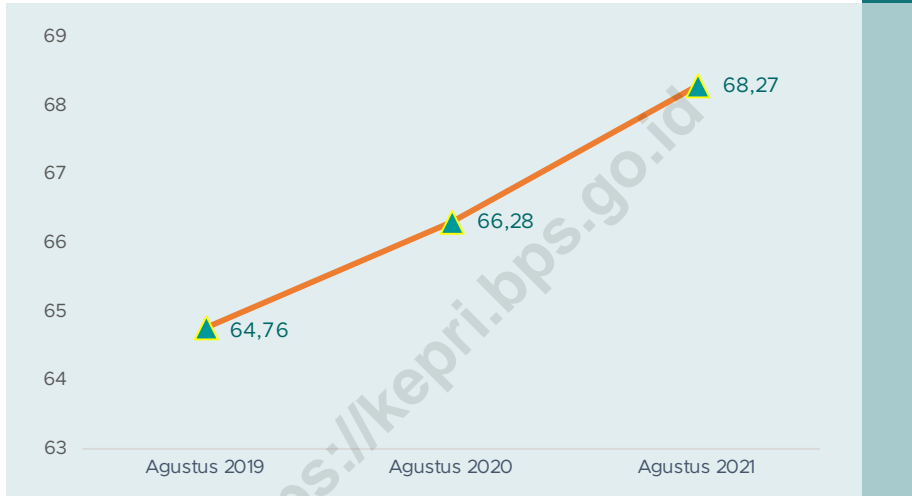
4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan Sakernas melakukan aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan.

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021 menunjukkan bahwa TPAK di Provinsi Kepulauan Riau

mengalami kenaikan menjadi 68,27 persen, dari 66,28 persen pada Agustus 2020.

Gambar 4.2 TPAK di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2019-Agustus 2021



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2019-2021

4.4 Penduduk yang Bekerja

Penduduk yang bekerja pada Agustus 2021 berjumlah 1.087.419 atau bertambah sebanyak 70.819 orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Agustus 2020).

4.4.1 Lapangan Pekerjaan

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaannya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut bertumpu. Lapangan usaha

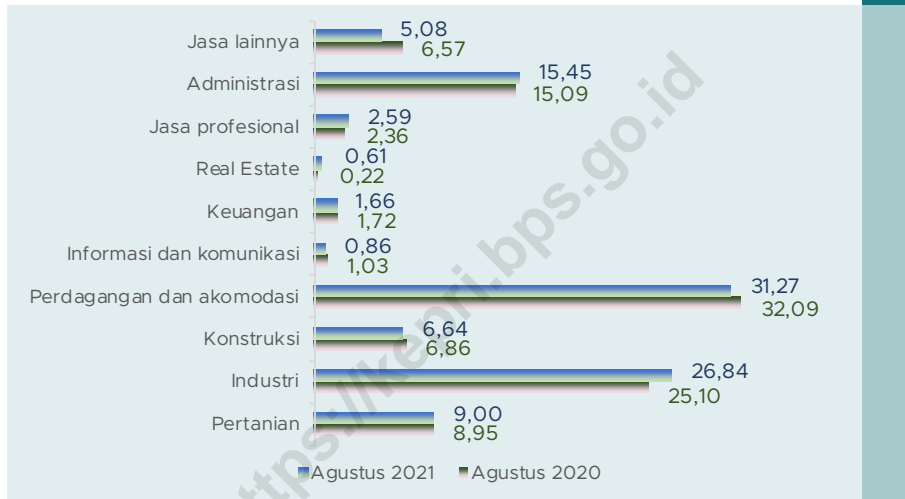
penduduk yang bekerja dibagi dalam tiga kelompok yaitu Pertanian (*Agriculture*), Industri (*Manufacture*), dan Jasa (*Service*). *Agriculture* terdiri atas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan. *Manufacture* terdiri atas Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas, dan Air; serta Konstruksi. *Service* terdiri atas Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi; Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan; serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor ekonomi yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Sektor perdagangan dan akomodasi, sektor industri, sektor administrasi, dan sektor pertanian secara berurutan menjadi penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau.

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2020, jumlah penduduk yang bekerja mengalami kenaikan pada beberapa sektor, yaitu sektor industri naik 1,74 persen, sektor real estate naik 0,39 persen, sektor administrasi naik 0,36 persen, sektor jasa profesional naik 0,23 persen dan sektor pertanian naik 0,05 persen. Sementara itu, sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor jasa lainnya turun 1,48 persen, sektor perdagangan dan akomodasi turun 0,82 persen, sektor konstruksi turun 0,23

persen, sektor informasi dan komunikasi turun 0,17 persen, dan sektor keuangan turun 0,06 persen.

Gambar 4.3 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2020 dan Agustus 2021



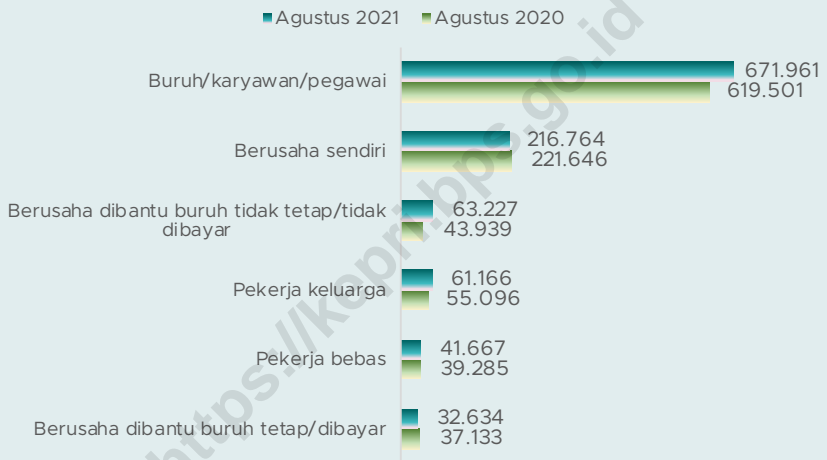
Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan 2021

4.4.2 Status Pekerjaan

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2021 sebesar 64,80 persen bekerja pada sektor formal dan sisanya 35,20 persen bekerja pada sektor informal.

Dalam kurun setahun terakhir (Agustus 2020-Agustus 2021), penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri berkurang sebanyak 4.882 orang.

Gambar 4.4 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kepulauan Riau (Orang), Agustus 2020 dan Agustus 2021

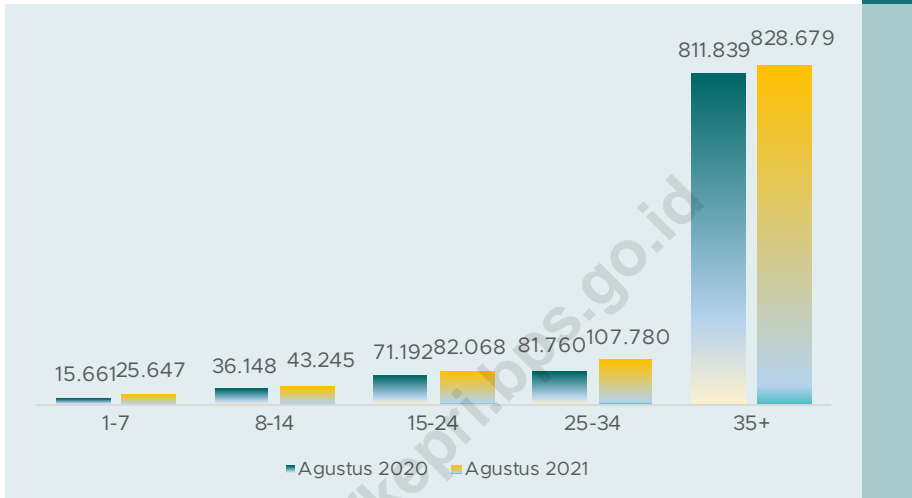


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan 2021

4.4.3 Jam Kerja

Secara umum, komposisi jumlah penduduk yang bekerja menurut jam kerja seluruhnya selama seminggu yang lalu mengalami perubahan berarti dari waktu ke waktu. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*), yaitu penduduk yang bekerja pada kelompok 35 jam ke atas per minggu, dimana pada Agustus 2021 mencapai 76,21 persen.

Gambar 4.5 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja per Minggu di Provinsi Kepulauan Riau (Orang), Agustus 2020 dan Agustus 2021



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan 2021

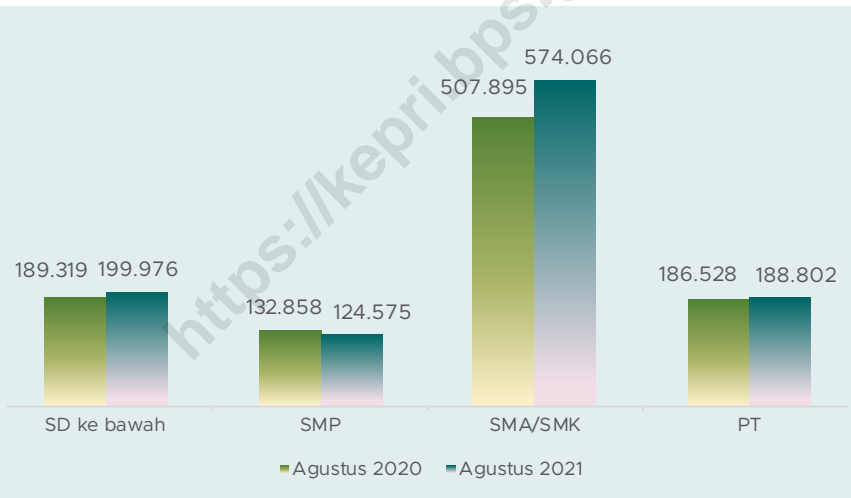
Sementara itu, dalam setahun terakhir pekerja tidak penuh (jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) bertambah sebanyak 53.979 orang (23,79 persen) yaitu dari 204.761 orang pada Agustus 2020 menjadi 258.740 orang pada Agustus 2021. Lebih spesifik, penduduk yang bekerja dengan jam kerja sangat rendah yaitu kurang dari 15 jam per minggu pada Agustus 2020 mencapai 68.892 orang (6,34 persen).

4.4.4 Pendidikan

Penyerapan tenaga kerja Agustus 2021 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) sebanyak 574.066 orang (52,79 persen). Kemudian

dilanjutkan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar ke bawah sebanyak 199.976 orang (18,39 persen), penduduk bekerja berpendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebanyak 188.802 orang (17,36 persen), dan penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 124.575 orang (11,46 persen).

Gambar 4.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (Orang), Agustus 2020 dan Agustus 2021



Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan 2021

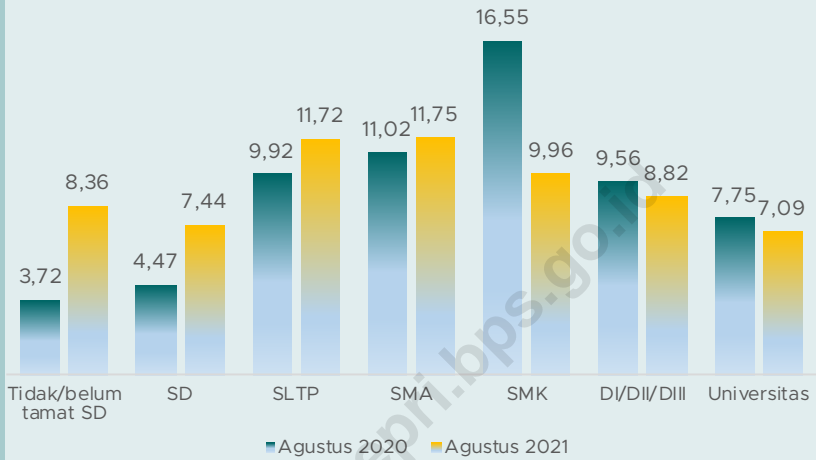
4.5 Tingkat Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi tersebut tidak jauh berbeda.

Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran. Jumlah pengangguran pada Agustus 2021 mencapai 119.595 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 9,91 persen atau turun sebesar 0,43 persen dibandingkan dengan Agustus 2020, dimana TPT Agustus 2020 sebesar 10,34 persen.

Adapun jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD ke bawah dan SMP mengalami peningkatan, sedangkan pengangguran dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA/SMK dan Perguruan Tinggi (PT) mengalami penurunan. Penganggur dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan SD ke bawah meningkat 3,51 persen dan SMP meningkat 1,80 persen. Sementara itu, penganggur dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan SMA/SMK turun 2,21 persen dan PT turun 0,78 persen.

Gambar 4.7 TPT Penduduk Usia 15 Tahun ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau (Persen), Agustus 2020 dan Agustus 2021

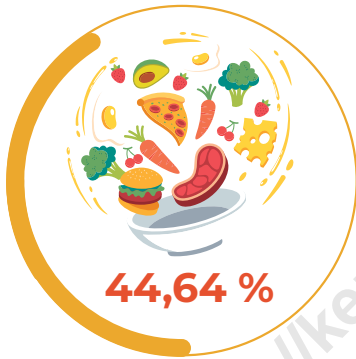


Sumber: BPS, Sakernas Agustus 2020 dan 2021

TARAF DAN POLA KONSUMSI

Informasi pola konsumsi bersumber dari data hasil Susenas Kor. Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan dengan cakupan relatif luas.

Pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Riau, 2021

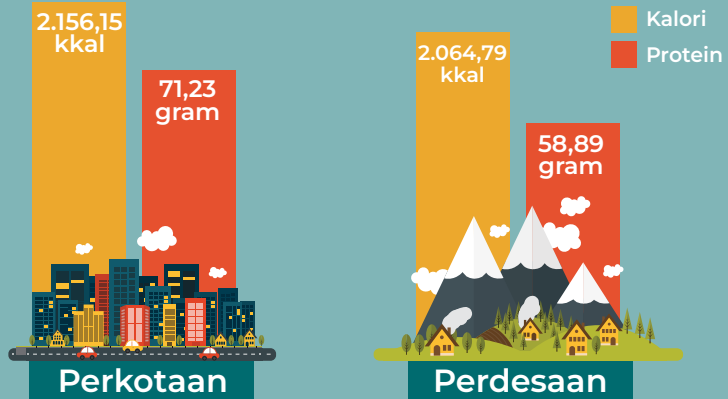


Makanan



Non Makanan

Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Bab 5

Taraf dan Pola Konsumsi

5.1 Pengeluaran Rumah Tangga

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Penurunan kemampuan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Secara umum, pengeluaran per kapita penduduk per bulan untuk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1.855.296 dengan persentase untuk makanan 44,64 persen dan 55,36 persen untuk non makanan atau dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok; 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas, maka tingkat ketimpangan dikatakan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah terhadap total pendapatan seluruh penduduk angkanya sekitar 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

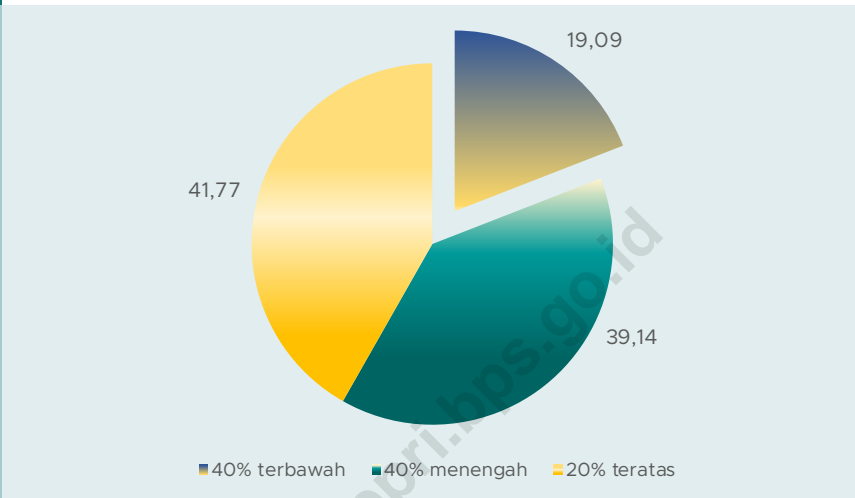
Tabel 5.1 Persentase Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran per Kapita per Bulan	
	Nominal (Rp)	Persentase
(1)	(2)	(3)
Makanan	828 206	44,64
Bukan Makanan	1 027 089	55,36
• Perumahan	562 308	30,31
• Barang & Jasa	241 372	13,01
• Barang Tahan Lama	83 355	4,49
• Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	44 384	2,39
• Pajak, Pungutan dan Asuransi	80 016	4,31
• Keperluan Pesta dan Upacara	15 654	0,84
Jumlah	1 855 296	100,00

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada Gambar 5.1, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 19,09 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Sedangkan 40 persen menengah sebesar 39,14 persen dan 20 persen teratas sebesar 41,77 persen.

Gambar 5.1 Pengeluaran Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kuartil (Persen), 2021

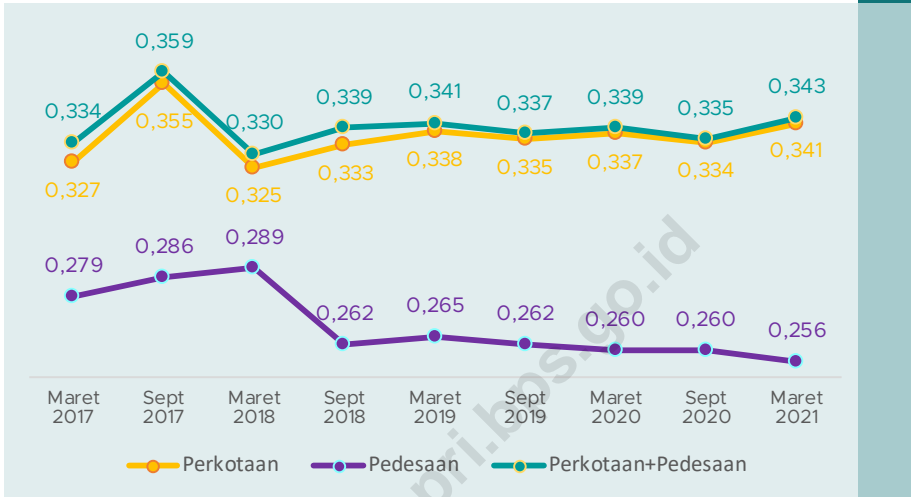


Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Ukuran lain untuk melihat sejauh mana ketimpangan distribusi pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan menggunakan indikator Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Nilai Gini Ratio yang semakin mendekati angka 1, menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada Gambar 5.2 dapat dilihat bahwa nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,343 meningkat 0,004 poin dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah tempat tinggal terlihat bahwa ketimpangan di perkotaan lebih tinggi dibanding pedesaan, dimana nilai Gini Ratio perkotaan sebesar 0,341 sedangkan pedesaan sebesar 0,256.

Gambar 5.2 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016-Maret 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2016-2021

5.2 Konsumsi Kalori dan Protein

Indikator lain yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kandungan kalori dan protein makanan yang dikonsumsi penduduk. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengkonversikan kuantitas makanan yang dikonsumsi ke dalam kalori atau protein setiap komoditas makanan yang dikonsumsi kemudian dijumlahkan.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2012, angka kecukupan kalori penduduk Indonesia adalah

2.150 kkal per kapita per hari sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 adalah sebesar 57 gram per kapita per hari.

Tabel 5.2 Rata-Rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita per Hari menurut Daerah Tempat Tinggal di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021

Daerah Tempat Tinggal	2020		2021	
	Kalori*	Protein**	Kalori*	Protein**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	2 149,96	70,42	2 156,15	71,23
Pedesaan	2 053,92	60,07	2 064,79	58,89
Perkotaan+Pedesaan	2 140,41	69,39	2 149,34	70,31

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pada tahun 2021, besarnya rata-rata konsumsi kalori masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sebesar 2.149,34 kkal per kapita per hari. Besarnya rata-rata konsumsi tersebut berada di bawah standar kecukupan gizi menurut WNPG 2012. Namun demikian, angka rata-rata konsumsi kalori menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 2.140,41 kkal per kapita per hari.

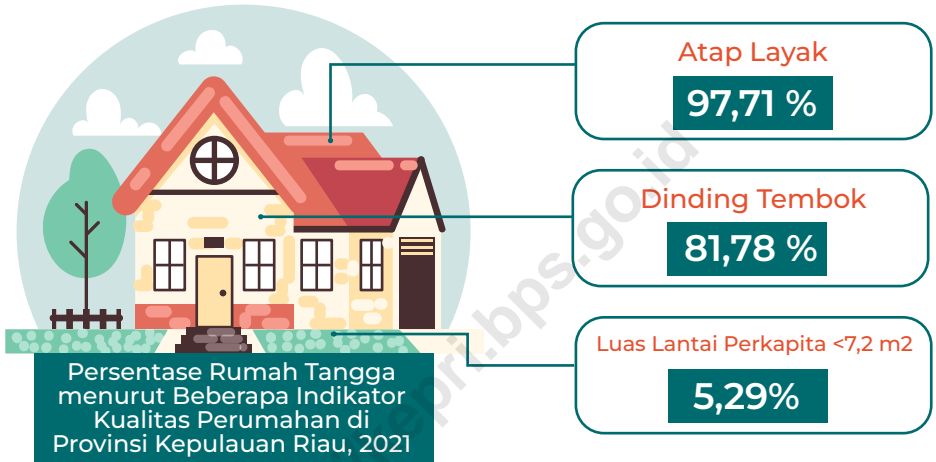
Jika dibandingkan menurut daerah tempat tinggal, maka terlihat bahwa rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari dari penduduk yang tinggal di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Selain konsumsi kalori, konsumsi protein juga digunakan sebagai pendekatan terhadap

kesejahteraan rumah tangga. Rata-rata konsumsi protein per kapita per hari pada tahun 2021 di Kepulauan Riau sebesar 70,31 gram per kapita per hari. Angka ini juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun lalu yang sebesar 69,39 gram per kapita per hari. Merujuk pada standar kecukupan gizi nasional WNPNG 2004, maka dapat dikatakan angka kecukupan protein penduduk Kepulauan Riau sudah di atas standar nasional.

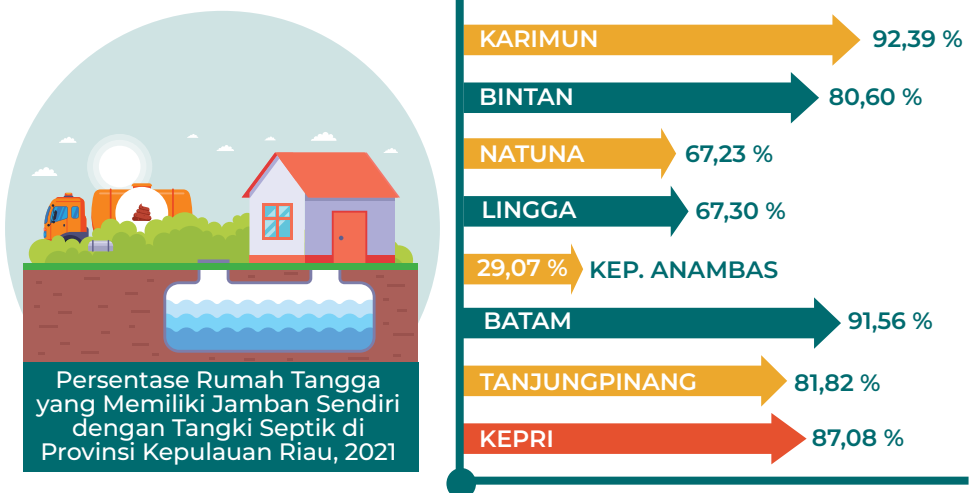
Sama halnya dengan konsumsi kalori perkapita per hari, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari penduduk di perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan tingkat pendapatan (yang diukur dari pengeluaran), dimana pendapatan penduduk perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Penduduk yang berpendapatan rendah cenderung memiliki keragaman pangan yang rendah. Begitu pula dari sisi kuantitas pangan yang dikonsumsi yang relatif lebih terbatas dibanding penduduk yang berpendapatan tinggi.

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Berisikan indikator-indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Informasi ini bersumber dari data hasil Susenas Kor. Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan dengan cakupan relatif luas.



Salah satu fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal adalah jamban dengan tangki septik.



Bab 6

Perumahan dan Lingkungan

6.1 Pendahuluan

Manusia dan alam lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun sosial, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah, maupun buatan manusia. Alam sekitar yang kelihatannya sangat alamiah, kadang sewaktu-waktu dapat menjadi sangat ganas. Untuk itu, manusia menciptakan tempat perlindungan berupa rumah atau tempat tinggal. Manusia sebagai makhluk sosial, secara alamiah pula mempunyai keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga berkumpul pulalah beberapa bangunan rumah tinggal dan terbentuklah suatu pemukiman rumah penduduk.

Rumah tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sepanjang hidupnya selain kebutuhan sandang dan pangan. Sehingga rumah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat terus bertahan hidup. Jika kebutuhan primer tersebut tidak dapat dipenuhi, maka mereka akan sangat sulit untuk dapat hidup secara layak.

Rumah, selain sebagai tempat untuk berteduh dan berlindung, baik dari hujan maupun panas, juga diperlukan untuk memberi rasa aman bagi penghuninya dari gangguan yang tidak diinginkan. Selain itu, rumah juga merupakan tempat berkumpul bagi para penghuninya, yang biasanya merupakan satu ikatan keluarga. Lebih jauh lagi, rumah juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesejahteraan penghuninya. Beberapa fasilitas perumahan yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga adalah luas lantai rumah, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan tempat penampungan kotoran atau tinja.

6.2 Kualitas Rumah Tinggal

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga serta sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya. Karenanya, kondisi rumah sangat berperan dalam menentukan tingkat kesehatan para penghuninya, rumah yang tidak sehat dapat menjadi media penularan penyakit bagi anggota rumah tangga yang menghuninya atau bahkan bagi para tetangga di sekitarnya.

Salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah atau tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain

digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dapat dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan).

Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 5,29 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 7.2 m² per anggota rumah tangga. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Lingga memiliki persentase yang tertinggi, yaitu mencapai 5,87 persen.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga dengan		
	Luas Lantai per Kapita <7,2 m ²	Atap Layak	Dinding Tembok
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	4,96	99,13	82,98
Bintan	3,78	97,78	90,12
Natuna	2,96	98,89	47,23
Lingga	5,87	98,00	32,91
Kep. Anambas	4,83	99,36	28,13
Batam	5,77	97,44	86,6
Tanjungpinang	4,15	97,19	86,07
Kepulauan Riau	5,29	97,71	81,78

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Indikator kualitas perumahan yang lain diantaranya adalah rumah tinggal dengan atap yang layak. Suatu rumah dikatakan memiliki atap yang layak apabila jenis atap rumah terluas adalah yang tidak beratap dedaunan atau atap lainnya. Pada tahun 2021, banyaknya rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang tinggal di rumah dengan atap yang layak mencapai 97,71 persen.

Persentase rumah tinggal dengan dinding permanen (dinding tembok) di Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 87,63 persen pada tahun 2021. Jika dilihat persentasenya per kabupaten/kota, yang paling rendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 32,84 persen.

6.3 Kelengkapan Fasilitas Pokok Rumah

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah yang terdapat pada Tabel 6.2 akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal dan juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih, serta jamban dengan tangki septik. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 99,71 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, yang berarti masih ada sebanyak 0,29 persen rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2021, rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan air kemasan bermerk dan air ledeng (termasuk air isi ulang) sebagai sumber air minum utama sudah mencapai 83,92 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Batam merupakan satu-satunya wilayah yang angkanya sudah di atas angka provinsi, yaitu sebesar 98,46%. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih, yaitu yang bersumber dari air kemasan, air isi ulang, ledeng, dan pompa, sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat adalah sejauh 10 meter, pada tahun 2021 tercatat sebesar 91,99 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Beberapa Fasilitas Pokok Perumahan di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/kota	Persentase Rumah Tangga dengan			
	Penerangan Listrik	Air Minum Ledeng & Kemasan	Air Minum Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Karimun	99,49	55,65	79,87	92,39
Bintan	99,21	46,14	71,2	80,60
Natuna	99,26	65,99	81,34	67,23
Lingga	96,56	48,78	79,07	67,30
Kep. Anambas	99,83	60,11	63,95	29,07
Batam	99,97	98,46	98,81	91,56
Tanjungpinang	100,00	66,74	87,39	81,82
Kepulauan Riau	99,71	83,92	91,99	87,08

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan, terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana.

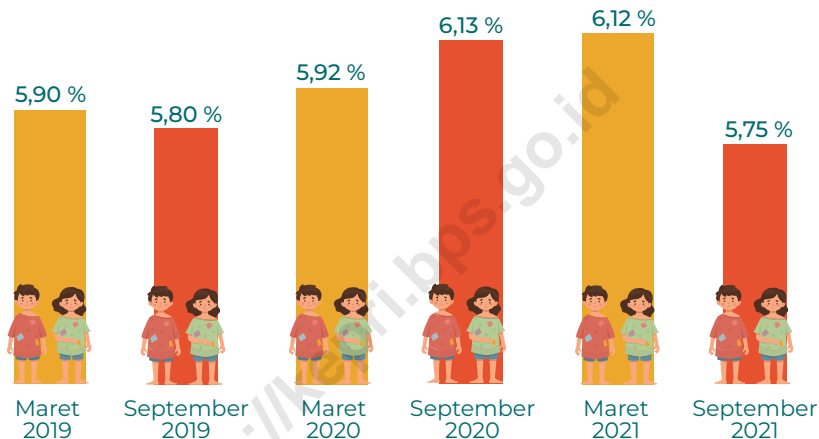
Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2021, proporsi rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik baru mencapai 87,08 persen. Sementara itu, bila dilihat menurut kabupaten/kota, Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang sudah berada di atas nilai Provinsi Kepulauan Riau, yaitu masing-masing sebesar 91,56 persen dan 92,39 persen.

<https://kepri.bps.go.id>

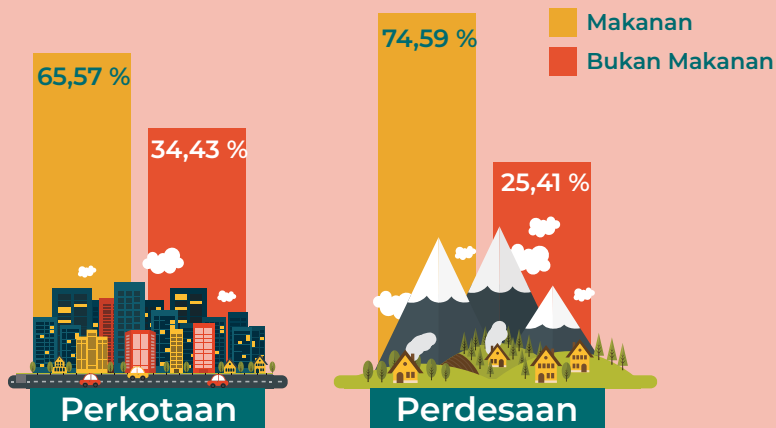
KEMISKINAN

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Presentase Penduduk Miskin di Provinsi Kepulauan Riau



Struktur Pengeluaran Rumah Tangga Miskin per Kapita per Hari di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Bab 7

Kemiskinan

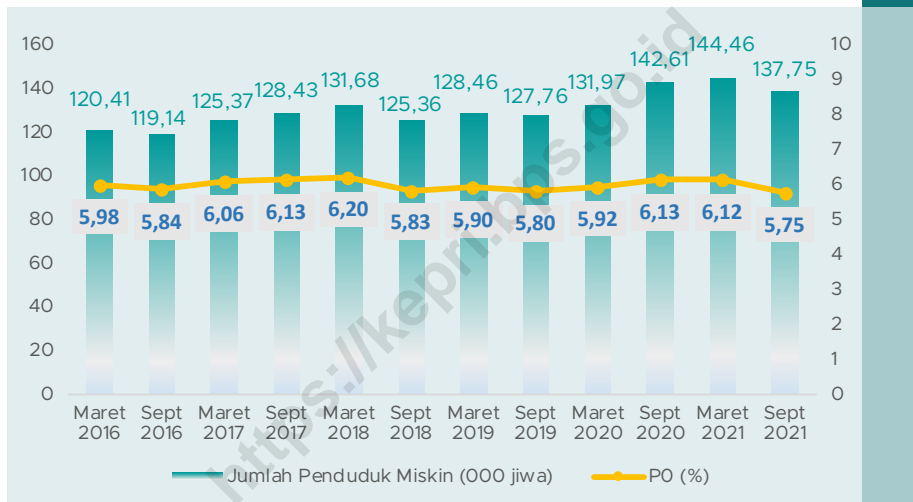
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021, sebanyak 6,12 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 9,47 persen. Sementara, bila dibandingkan dengan kondisi September 2020, jumlah penduduk miskin meningkat sekitar 1,30 persen. Perkembangan jumlah

penduduk miskin dan angka kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada Gambar 7.1 .

Gambar 7.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Angka Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, Maret 2016-Maret 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret dan September 2016-2021

7.2 Garis Kemiskinan

Kemiskinan absolut pada umumnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Bila dibandingkan kondisi Maret 2021, Garis Kemiskinan

Provinsi Kepulauan Riau September 2021 mengalami kenaikan sekitar 1,78 persen. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kondisi September 2020, kenaikan Garis Kemiskinan sebesar 5,88 persen.

Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan kondisi September 2021 adalah sebesar 66,19 persen. para tetangga di sekitarnya.

Tabel 7.1 Garis Kemiskinan Makanan dan Bukan Makanan di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021

Periode	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2020	410 225	204 502	614 727
September 2020	410 811	206 721	617 532
Maret 2021	429 298	213 127	642 425
September 2021	432 804	221 050	653 853

Sumber: BPS, Susenas Maret dan September 2020-2021

Berdasarkan hasil Susenas September 2021, komoditas makanan yang menyumbang kontribusi terbesar pada Garis Kemiskinan adalah beras, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan di daerah perkotaan sebesar 13,12 persen, sedangkan di daerah pedesaan sebesar 20,19 persen. Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar kedua setelah beras, baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah rokok kretek filter, dimana menyumbang sebesar 10,18 persen di perkotaan dan 19,19 persen di pedesaan.

Tabel 7.2 Daftar Komoditi Berdasarkan Sumbangan terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%) di Provinsi Kepulauan Riau, September 2021

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	65,57	Makanan	74,59
Beras	13,12	Beras	20,19
Rokok kretek filter	10,18	Rokok kretek filter	19,19
Daging ayam ras	4,98	Kue basah	4,37
Telur ayam ras	4,01	Telur ayam ras	3,78
Tongkol/tuna/cakalang	3,14	Gula pasir	3,71
Mie instan	2,62	Kopi bubuk	3,05
Kue basah	2,38	Kue kering	2,85
Cabe merah	1,88	Mie instan	2,80
Tahu	1,73	Daging ayam ras	2,24
Tempe	1,57	Bawang merah	1,52
Gula pasir	1,56	Roti	1,38
Bawang merah	1,54	Susu kental manis	1,14
Lainnya	16,86	Lainnya	8,38

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bukan Makanan	34,43	Bukan Makanan	25,41
Perumahan	10,31	Perumahan	8,30
Listrik	6,67	Listrik	2,74
Bensin	4,97	Bensin	2,18
Pendidikan	2,63	Perlengkapan mandi	1,49
Perlengkapan mandi	1,31	Pakaian jadi anak-anak	1,12
Air	1,07	Pakaian jadi perempuan dewasa	1,08
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,97	Pakaian jadi laki-laki dewasa	1,01
Lainnya	6,50	Lainnya	7,49

Sumber: BPS, Susenas September 2021

Biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan, yaitu 10,31 persen di perkotaan dan 8,30 persen di pedesaan. Komoditas bukan makanan lainnya yang berpengaruh cukup besar pada GKBM, antara lain biaya yang dikeluarkan untuk listrik di uruta kedua (6,67 persen di perkotaan dan 2,74 persen di pedesaan) dan bensin di urutan ketiga (4,97 persen di perkotaan dan 2,18 persen di pedesaan). Sementara itu, komoditas yang menempati urutan keempat di perkotaan adalah jasa pendidikan sebesar 2,63 persen di perkotaan, sedangkan di pedesaan adalah perlengkapan mandi sebesar 1,49 persen.

7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga sekaligus harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2021 mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,070 pada Maret 2021 menjadi 0,953 pada September 2021. Demikian pula halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang turun dari 0,280 pada Maret 2021 menjadi 0,218 pada September 2021.

Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah pedesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada Maret 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,024 sementara di daerah pedesaan sebesar 1,844. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan adalah 0,268 sedangkan di daerah pedesaan sebesar 0,435. selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 7.3.

Tabel 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Provinsi Kepulauan Riau, 2020-2021

Periode	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)			
Maret 2020	1,024	1,844	1,106
September 2020	1,155	1,888	1,213
Maret 2021	1,015	1,747	1,070
September 2021	0,885	1,815	0,953
Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2)			
Maret 2020	0,268	0,435	0,285
September 2020	0,415	0,513	0,423
Maret 2021	0,270	0,413	0,280
September 2021	0,198	0,474	0,218

Sumber: BPS, Susenas Maret dan September, 2020 dan 2021

SOSIAL LAINNYA

Informasi Sosial Lainnya juga bersumber dari data hasil Susenas. Aspek sosial lainnya berhubungan dengan kegiatan yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk



Ya, dapat menunjukkan Kartu

3,27 %

Ya, Tidak dapat menunjukkan Kartu

2,17 %

Tidak memiliki kartu

94,57 %



Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Pernah Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pernah

15,45 %

Tidak Pernah

84,51 %



0,94 persen



1,92 persen

Persentase Penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan setahun terakhir di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

sebanyak 1,44 persen penduduk Provinsi Kepulauan Riau menjadi korban kejahatan dalam setahun terakhir (2021)

Bab 8

Sosial Lainnya

8.1 Pendahuluan

Aspek sosial lainnya yang dibahas pada bab ini utamanya yang berhubungan dengan kegiatan yang dapat mencerminkan kesejahteraan penduduk. Pada umumnya semakin banyak seseorang memanfaatkan waktu luang untuk melakukan kegiatan sosial budaya maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang semakin baik, karena waktu yang ada tidak hanya digunakan untuk mencari nafkah.

8.2 Perlindungan Sosial

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial dalam rangka program percepatan dan perluasan perlindungan sosial. Kartu ini berfungsi untuk membantu meringankan hidup rakyat miskin. Pada tahun 2021, persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki dan dapat menunjukkan kartu KPS/KKS adalah sebesar 3,27 persen. Jika dirinci menurut

kabupaten/kota, maka Kabupaten Lingga adalah wilayah dengan persentase rumah tangga yang memiliki kartu KPS dan dapat menunjukkan kartu terbesar yaitu sebesar 6,70 persen. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebagai kabupaten dengan persentase terkecil yaitu 1,36 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki tetapi tidak bisa menunjukkan kartu sebesar 2,17 persen.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Ya, Dapat Menunjukkan Kartu	Ya, Tidak Dapat Menunjukkan Kartu	Tidak Memiliki
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	2,72	1,51	95,77
Bintan	2,10	1,21	96,69
Natuna	2,59	1,68	95,73
Lingga	6,70	1,34	91,96
Kep. Anambas	1,36	0,64	98,01
Batam	3,22	2,15	94,63
Tanjungpinang	4,16	4,46	91,37
Kepulauan Riau	3,27	2,17	94,57

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

8.3 Akses terhadap Informasi

Kegiatan masyarakat pada umumnya adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akses pada informasi seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca surat kabar, dan mengakses internet. Pada sub bab ini, hanya disajikan informasi mengenai penduduk yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir.

Tabel 8.2 menunjukkan bahwa penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 81,03 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka masih didominasi oleh penduduk Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dalam mengakses internet dalam 3 bulan terakhir yaitu masing-masing sebesar 87,95 persen dan 80,62 persen. Sebaliknya, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebagai wilayah dengan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir terkecil yaitu masing-masing 53,53 persen dan 58,72 persen. Kondisi tersebut memang masih dimaklumi mengingat kedua kabupaten tersebut masih belum memiliki sarana dan prasarana sinyal telekomunikasi yang memadai.

Tabel 8.2 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	68,84	63,03	66,00
Bintan	73,17	70,9	72,09
Natuna	63,35	57,94	60,72
Lingga	55,55	51,43	53,53
Kep. Anambas	62,34	54,81	58,72
Batam	87,78	88,11	87,95
Tanjungpinang	80,27	80,98	80,62
Kepulauan Riau	81,36	80,71	81,03

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

8.4 Keadaan Sosial Ekonomi Rumah Tangga

Selain dari aspek kesejahteraan yang dilihat dari kegiatan dan akses ke media massa, bab ini juga menerangkan tentang keadaan sosial ekonomi rumah tangga, di antaranya pada aspek yang berkaitan dengan banyaknya rumah tangga yang menerima program atau bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan rumah tangga yang menerima kredit usaha.

Tabel 8.3 Persentase Rumah Tangga Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Ya	Tidak	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	5,07	94,93	100
Bintan	5,64	94,36	100
Natuna	5,65	94,35	100
Lingga	8,34	91,66	100
Kep. Anambas	4,66	95,34	100
Batam	4,04	95,96	100
Tanjungpinang	8,50	91,50	100
Kepulauan Riau	4,91	95,09	100

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa dalam setahun terakhir ada sebesar 4,91 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau yang pernah mendapat PKH. Jika dilihat persentase rumah tangga yang menerima PKH antarkabupaten/kota, maka terdapat lima kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga penerima PKH lebih besar dari angka provinsi, yaitu Kota Tanjungpinang (8,50 persen), Kabupaten Lingga (8,34 persen), Kabupaten Natuna (5,65 persen), Kabupaten Bintan (5,64 persen), dan Kabupaten Karimun (5,07 persen).

Dari sekitar 4,91 persen rumah tangga yang menyatakan pernah menerima PKH dalam setahun terakhir, 87,73 persennya

menyatakan saat ini masih tercatat sebagai penerima program, sedangkan 12,27 sisanya menyatakan tidak tercatat lagi ataupun tidak tahu. Dari 87,73 persen rumah tangga yang saat ini masih tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan, sebanyak 31,60 persen menerima bantuan PKH di ATM, 20,59 persen menerima PKH di kantor Bank, dan 19,96 persen di agen Bank.

Tabel 8.4 menunjukkan bahwa 15,49 persen rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau pernah menerima kredit usaha dalam setahun terakhir. Persentase tertinggi adalah Kabupaten Bintan, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.

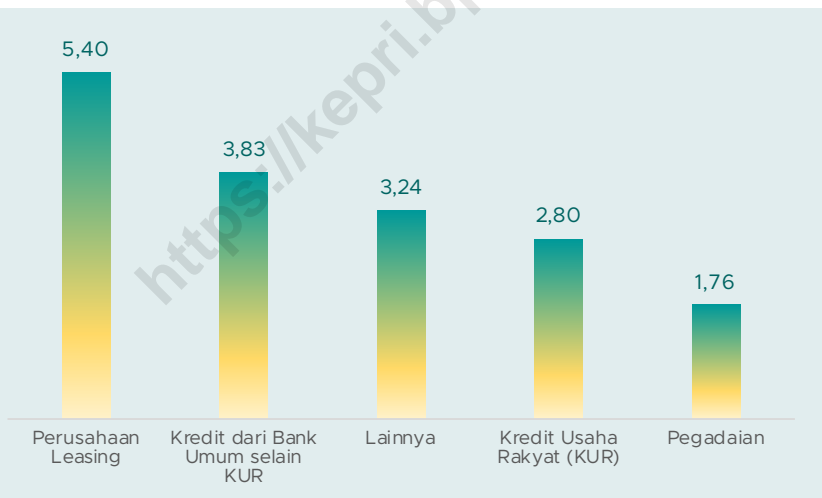
Tabel 8.4 Persentase Rumah Tangga yang Pernah dan Tidak Pernah Menerima Kredit dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Pernah	Tidak Pernah	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	12,50	87,50	100
Bintan	24,38	75,62	100
Natuna	21,27	78,73	100
Lingga	13,02	86,98	100
Kep. Anambas	13,00	87,00	100
Batam	13,97	86,03	100
Tanjungpinang	22,21	77,79	100
Kepulauan Riau	15,49	84,51	100

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat menurut jenis kredit, kredit yang paling banyak diterima oleh rumah tangga di Provinsi Kepulauan Riau adalah kredit yang bersumber dari perusahaan leasing yaitu sebesar 5,40%. Kemudian diikuti oleh kredit dari Bank umum selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3,83%, kredit lainnya (BPR, Koperasi, Perorangan dengan bunga, KUBE, Bumdes, dll) sebesar 3,24%, Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 2,80%, dan pegadaian sebesar 1,76%.

Gambar 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit menurut Jenis Kredit di Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

8.5 Tindak Kejahatan

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat terganggu jika mengalami korban tindak kejahatan. Secara umum dari Tabel 8.5 menunjukkan bahwa sebanyak 1,44 persen penduduk di Kepulauan Riau pada tahun 2021 menjadi korban tindak kejahatan selama setahun terakhir. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan terbanyak adalah di Kota Batam yaitu sebesar 2,00 persen.

Tabel 8.5 Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan dalam Setahun Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Karimun	0,62	0,21	0,42
Bintan	0,43	0,39	0,41
Natuna	0,00	0,12	0,06
Lingga	0,13	0,00	0,07
Kep. Anambas	0,26	0,27	0,27
Batam	2,77	1,24	2,00
Tanjungpinang	0,44	0,83	0,64
Kepulauan Riau	1,92	0,94	1,44

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Lampiran

<https://pubri.bps.go.id>

Lampiran 1. *Sampling Error* Indikator

Nama Indikator (1)	Nilai Estimasi (2)	RSE (3)
Angka kesakitan menurut kabupaten/kota		
- Karimun	10,08	21,79
- Bintan	3,44	25,38
- Natuna	5,24	17,62
- Lingga	8,98	14,13
- Kep. Anambas	4,84	29,80
- Batam	4,45	12,25
- Tanjungpinang	3,38	23,58
Persentase baduta yang pernah diberi ASI menurut kabupaten/kota		
Laki-laki		
- Karimun	94,00	3,84
- Bintan	92,45	6,04
- Natuna	94,85	3,88
- Lingga	96,03	2,70
- Kep. Anambas	81,12	20,13
- Batam	93,30	3,91
- Tanjungpinang	100,00	-
Perempuan		
- Karimun	82,54	9,75
- Bintan	86,23	8,91
- Natuna	93,41	4,44
- Lingga	87,62	7,91
- Kep. Anambas	90,59	5,71
- Batam	89,75	5,33
- Tanjungpinang	99,73	0,20

Nama Indikator (1)	Nilai Estimasi (2)	RSE (3)
Laki-laki+Perempuan		
- Karimun	88,97	4,35
- Bintan	89,35	5,48
- Natuna	94,13	2,84
- Lingga	92,26	4,04
- Kep. Anambas	86,76	7,61
- Batam	91,65	3,29
- Tanjungpinang	99,84	0,12
Angka kesakitan menurut kabupaten/kota		
- Karimun	10,08	21,79
- Bintan	3,44	25,38
- Natuna	5,24	17,62
- Lingga	8,98	14,13
- Kep. Anambas	4,84	29,80
- Batam	4,45	12,25
- Tanjungpinang	3,38	23,58
Persentase baduta yang pernah diberi ASI menurut kabupaten/kota		
Laki-laki		
- Karimun	94,00	3,84
- Bintan	92,45	6,04
- Natuna	94,85	3,88
- Lingga	96,03	2,70
- Kep. Anambas	81,12	20,13
- Batam	93,30	3,91
- Tanjungpinang	100,00	-
Perempuan		
- Karimun	82,54	9,75
- Bintan	86,23	8,91

Nama Indikator	Nilai Estimasi	RSE
(1)	(2)	(3)
- Natuna	93,41	4,44
- Lingga	87,62	7,91
- Kep. Anambas	90,59	5,71
- Batam	89,75	5,33
- Tanjungpinang	99,73	0,20
Laki-laki+Perempuan		
- Karimun	88,97	4,35
- Bintan	89,35	5,48
- Natuna	94,13	2,84
- Lingga	92,26	4,04
- Kep. Anambas	86,76	7,61
- Batam	91,65	3,29
Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki		
- Tidak mempunyai ijazah	7,34	5,37
- SD/Sederajat	16,58	3,70
- SMP/Sederajat	17,91	3,49
- SMA/Sederajat	45,35	2,08
- Perguruan Tinggi	12,83	5,00
Persentase baduta yang pernah diberi ASI menurut kabupaten/kota		
Laki-laki		
- Karimun	94,00	3,84
- Bintan	92,45	6,04
- Natuna	94,85	3,88
- Lingga	96,03	2,70
- Kep. Anambas	81,12	20,13
- Batam	93,30	3,91
- Tanjungpinang	100,00	-

Nama Indikator (1)	Nilai Estimasi (2)	RSE (3)
Perempuan		
- Karimun	82,54	9,75
- Bintan	86,23	8,91
- Natuna	93,41	4,44
- Lingga	87,62	7,91
- Kep. Anambas	90,59	5,71
- Batam	89,75	5,33
- Tanjungpinang	99,73	0,20
Laki-laki+Perempuan		
- Karimun	88,97	4,35
- Bintan	89,35	5,48
- Natuna	94,13	2,84
- Lingga	92,26	4,04
- Kep. Anambas	86,76	7,61
- Batam	91,65	3,29
- Tanjungpinang	99,84	0,12
Presentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki		
- Bekerja	1.087.419	2,62
- Menganggur	119.595	7,63
TPAK	68,27	93,82
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama		
- Berusaha sendiri	216.764	4,58
- Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	63.227	8,11
- Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	32.634	11,49

Nama Indikator (1)	Nilai Estimasi (2)	RSE (3)
- Buruh/karyawan/pegawai	671.961	3,46
- Pekerja bebas di pertanian	5.729	18,23
- Pekerja bebas di non pertanian	35.938	12,03
- Pekerja keluarga	61.166	9,12
Persentase rumah tangga penerima PKH menurut kabupaten/kota		
- Karimun	5,07	23,76
- Bintan	5,64	21,31
- Natuna	5,65	21,57
- Lingga	8,34	19,41
- Kep. Anambas	4,66	22,46
- Batam	4,04	20,74
- Tanjungpinang	8,50	18,73
Persentase rumah tangga yang pernah dan tidak pernah menerima kredit dalam setahun terakhir menurut kabupaten/kota		
- Karimun	12,50	20,37
- Bintan	24,38	13,08
- Natuna	21,27	13,85
- Lingga	13,02	16,52
- Kep. Anambas	13,00	19,92
- Batam	13,97	11,98
- Tanjungpinang	22,21	17,84
Persentase rumah tangga yang menerima kredit menurut jenis kredit		
- Perusahaan leasing	5,40	14,43
- Kredit dari bank umum selain KUR	3,83	17,15
- Lainnya	3,24	15,45
- KUR	2,80	11,61
- Pegadaian	1,76	20,1

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. A. Yani No. 21 Tanjungpinang 29124
Telp: (0771) 4500155
Homepage: kepri.bps.go.id Email: bps2100@bps.go.id

